PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)**

UNIT KERJA : **BALAI BESAR POM DI SEMARANG**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RUSTYAWATI**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI BESAR**
3. NHK : **173152**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 3.925.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/318 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 153 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 8.440 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/30 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah Seluas 178 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/21 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 63.750.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

3. MOTOR, YAMAHA YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 1.750.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**97.000.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**63.996.061**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**4.149.746.061**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**4.149.746.061**

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.